

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL–UGM. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Yogyakarta, 2010.
- Bprd.jakarta.go.id (diakses 5 Maret 2019)
- Cnnindonesia.com/nasional/2018/kenaikan-pajak-parkir-tambah-pendapatan-dkirp25-m-per-bulan (diakses 10 Agustus 2019)
- Cnnindonesia.com/ekonomi/2018/pbb-mahal-karena-njop-naik-wajib-pajak-bisa ajukan-keberatan (diakses 10 Agustus 2019)
- Data.jakarta.go.id (diakses 10 Maret 2019)
- Ekonomi.kompas.com/read/2017/hotel-restoran-dan-tempat-hiburan-dipasang tapping -box-agar-jujur-bayar (diakses 10 Agustus 2019)
- FE-UNJ, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- IAI, *Modul Pelatihan Pajak Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2017.
- Jakarta.bisnis.com/read/2019/bprd-optimis-target-pajak-reklame-meningkat (diakses 10 Agustus 2019)
- Keuda.Kemendagri. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual*. Google. Jakarta Pusat. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasisakrual>. (Diakses 24 April 2019)
- Kusuma, Muhamad. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah*. Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.2013.
- Liputan6.com/bisnis/read/3927522/alasan-pemerintah-tak-naikkan-tarif-cukai-rokok (diakses 10 Agustus 2019)
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Jakarta : C.V Andi Offset, 2016.
- Megapolitan.kompas.com/read/2019/pemprov-dki-sebut-pajak-hiburan-sudah-disepakati-pengusaha (diakses 10 Agustus 2019)

Megapolitan.kompas.com/read/2018/terlalu-rendah-pajak-penerangan-jalan-dki-akan-dinaikkan
(diakses 10 Agustus 2019)

Megapolitan.kompas.com/read/2018/ini-penyebab-kenaikan-pbb-di-jagakarsa (diakses 10
Agustus 2019)

Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
2010.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Rahdina, D. P. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah*. Bogor: Institut Pertanian
Bogor.2011.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Jakarta

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
Bandung.2011

Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Sembilan, CV. Alfabeta Bandung.2011.

Simanjuntak, Binsar H. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Sektor*.2010.

Triantoro, Arvian. “Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung” .*Fokus Ekonomi*. Vol. 5 No. 1:1-24.2010

Tanjung, Abdul Hafiz. “Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual; Pendekatan Teknis
Sesuai PP No. 71/2010”, *Alfabeta*.2012.Vol.15 1:1-15.2012

Tribunnews.com/2017/11/11/pajak-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-turun-ini-alasannya
(diakses 10 Agustus 2019)

Tirto.id/menggali-pajak-para-pengebor-air-tanah-jakarta-ctXH (diakses 9 Agustus 2019)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 Pasal Tentang Pemerintah Daerah